

***IMPLEMENTATION of E-GOVERNMENT THROUGHT to
PUBLIC INFORMATION MEDIA WEB BASED AREA IN
THE CITY of TEGAL***

By :

A.Iqbal Fuadi, Aufarul Marom

**Public Administration, The Faculty of social and political science
Diponegoro University**

Prof. Soedharto SH St., Kampus Tembalang, Semarang

Email : iqbalakone@gmail.com

ABSTRACT

Now days, there are still many people complaining about about the lack of transparency between government and community. It can happen because the low public awareness to utilize the progress of technology and the lack of socialization government using technology. The internet be a primary needed to the peoples, not only in urban areas even in the region has been a need of.

E government through the public information aims to access and disseminate information in the regions and center so as easy the people to will have all information about bureaucracy in the areas. In this research the writers use qualitative with dishub of communication informatics where website tegal distric as an object .

The research results show the low level of awareness the peoples in tegal distric. It seen from the number of visitors website as many as 7000-8000 in 2015. And every year can be fluctuative. When compared with the population of productive age in Tegal district, the percentage is still weak, which is only 11% of the population in productive age, amounting to 889 565.

Keywords : Impementation, E-Government, Public Information Media, Website

IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT MELALUI MEDIA INFORMASI PUBLIK BERBASIS WEBSITE DAERAH di KABUPATEN TEGAL

Abstraksi

Pada era globalisasi saat ini, masih banyak masyarakat yang mengeluhkan tentang kurangnya transparansi antara pemerintahan dan masyarakat. Hal ini bisa terjadi karena rendahnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan kemajuan teknologi dan kurangnya sosialisasi pemerintah tentang pemanfaatan teknologi. internet menjadi suatu kebutuhan primer bagi masyarakat luas, tidak hanya di wilayah perkotaan bahkan di daerah pun sudah menjadi kebutuhan.

E-government melalui media informasi publik bertujuan untuk mengakses dan menyebarkan informasi yang ada di daerah maupun pusat sehingga mempermudah masyarakat untuk mendapat segala informasi tentang birokrasi pada daerah tersebut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan obyek penelitian dishubkominfo dimana website kabupaten tegal dikelola.

Hasil penelitian menunjukkan masih rendahnya kesadaran masyarakat kabupaten tegal dilihat dari jumlah pengunjung website sebanyak 7000-8000 pada tahun 2015. Dan tiap tahun menunjukkan perubahan angka yang fluktuatif. Jika di bandingkan dengan jumlah penduduk usia produktif di kabupaten tegal, maka prosentase yang ada masih lemah, yaitu baru 11% dari jumlah penduduk dengan usia produktif yang berjumlah 889.565

Kata Kunci : Implementasi, e-Government, Media Informasi Publik, website

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengolahan, dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Informasi dan pengetahuan dapat diciptakan secara cepat dan dapat segera disebarkan ke seluruh lapisan masyarakat di berbagai belahan dunia dalam hitungan detik. Hal ini berarti bahwa setiap individu di berbagai

negara dapat saling berkomunikasi secara langsung kepada siapapun yang dikehendaki tanpa dibutuhkan perantara (mediasi) apapun.

Penerapan teknologi informasi pada lembaga pemerintahan dapat mempermudah akses antara masyarakat dengan pemerintah. Tidak hanya melalui komunikasi satu arah saja dimana pemerintah dapat mempublikasikan data dan informasi yang dimilikinya. Akan tetapi juga komunikasi dua arah, yaitu masyarakat dapat menerima dari pemerintah dan memberikan informasi

kepada pemerintah. Dengan begitu, adanya transparansi antara pemerintah dan masyarakat dapat terjalin dalam ruang lingkup demokrasi sebagai bagian dari penunjang akuntabilitas pemerintah. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi adalah untuk mewujudkan praktek pemerintahan yang lebih efisien dan efektif.

Kebijakan penerapan *electronic Government (e-Government)* merupakan suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik. Perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi (TI), Pemerintah dituntut untuk memberikan informasi-informasi yang sudah tertuang dalam Undang-undang No. 14 tahun 2008 guna menciptakan salah satu asas penyelenggaraan pemerintah yang baik yaitu asas keterbukaan dengan asas keterbukaan ini maka juga akan timbul mengikuti asas yang lain misalnya asas kepercayaan. Karena pemerintah terbuka dalam penyelenggaraan dan siap sedia untuk memberikan informasi publik apapun ketika dibutuhkan asal itu sesuai perundang-undangan dan bukan rahasia yang bisa dikonsumsi untuk masyarakat umum. Salah satunya yang bisa dijadikan informasi publik yaitu, APBD, program-program pemerintah, realisasi program, informasi tentang wilayah dan semua yang bersifat publik.

Dalam sejarahnya, pemanfaatan dalam pemerintahan dimulai pada tahun 1992 ketika pada beberapa Pemerintah Daerah (Pemda Tingkat II, istilah saat itu) menerapkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) melalui pemanfaatan *computer stand alone*. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan *e-Government*. Pada intinya, Inpres tersebut membahas tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*.

Kebijakan penerapan *e-Government* melalui MIP tersebut berdasarkan SK PINLAK No.01/SIM/PI-Humas/II/2006 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Kabupaten Tegal. Pemerintah Kabupaten Tegal dengan komitmen peningkatan kinerja terkait informasi keterkaan publik mencoba mengembangkan penerapan kebijakan *e-Government* dengan membangun sistem MIP di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (SKPD). Namun, dalam prakteknya kebijakan penerapan MIP di SKPD belum maksimal, hanya beberapa SKPD yang sudah menerapkan kebijakan MIP, contohnya adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal.

Salah satu sarana keterbukaan informasi melalui MIP di Kabupaten Tegal adalah *website* daerah. *Website* daerah dapat menjadi sarana transmisi informasi dari Pemerintah Daerah mengenai kondisi daerahnya, kondisi birokrasi dan berita-berita di daerah tersebut. Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal telah membuat *website* www.tegalkab.go.id sebagai wujud dari kebijakan penerapan *e-Government* melalui Media Informasi Publik tersebut. Masyarakat Kabupaten Tegal dapat mengakses *website* www.tegalkab.go.id dengan mudah melalui sarana-sarana penunjang *website* yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal. Masyarakat Kabupaten Tegal dapat mengakses *website* www.tegalkab.go.id melalui beberapa fasilitas yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal. Kemudahan yang diberikan diantaranya adalah masyarakat dapat mengakses langsung melalui Internet, serta memanfaatkan jaringan wifi di sekitar Alun-Alun Slawi. Namun, dengan membuat *website* daerah Kabupaten Tegal sebagai sarana keterbukaan informasi bukan berarti berjalan begitu saja tanpa ada masalah yang muncul. Masalah yang timbul dalam

pengaplikasian situs daerah berbasis website adalah terkait dengan instansi yang berwenang dalam website daerah tersebut, yakni Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo).

Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting lainnya. Staf pemerintahan terutama yang menangani secara langsung website daerah yaitu Dishubkominfo Kabupaten Tegal. Keberadaan suatu media informasi baru di dalam sebuah Pemerintahan Daerah memerlukan sebuah adaptasi. Selain itu keberadaan tenaga ahli merupakan faktor pendukung lainnya. Tenaga ahli sangat diperlukan sebagai operator website daerah tersebut. Tenaga ahli di Pemerintah Kabupaten Tegal saat ini masih kurang, terutama tenaga ahli yang memiliki kemampuan di bidang sistem informasi dan komputerisasi. Kekurangan tenaga ahli tersebut merupakan kendala yang harus dihadapi, selain budaya kerja yang konvensional. Masalah lain yang sering muncul adalah keakuratan data dan update informasi-informasi baru. Informasi yang ditampilkan dalam website daerah Kabupaten Tegal harus selalu update dengan informasi-informasi terkini sehingga website tersebut menjadi pilihan sumber pencarian informasi untuk masyarakat Kabupaten Tegal. Tampilan dan isi website yang menarik juga perlu diterapkan agar menarik minat lebih banyak pengguna untuk mengakses.

1.2 Tujuan

Mengetahui bagaimana Implementasi *e-Government* melalui MIP (Media Informasi Publik) oleh Pemerintah Kabupaten Tegal. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam Implementasi *e-Government* melalui MIP (Media Informasi Publik) oleh Pemerintah Kabupaten Tegal

1.3 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.3.1 Administrasi Publik

Administrasi Publik merupakan proses kegiatan yang bersifat penyelenggaraan yang disusun untuk mengatur kerja sama kelompok dalam lingkungan pemerintahan dan diselenggarakan oleh aparat pemerintah untuk kepentingan umum. Proses penyelenggaraan dan pengaturan kerjasama mendasarkan pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh badan perwakilan politik untuk merealisasikan tujuan Administrasi Publik itu sendiri.

1.3.2 Kebijakan Publik

Menurut Nugroho (2004:3), Suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggarannya yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi. Aturan atau peraturan tersebut secara sederhana kita pahami sebagai kebijakan publik, jadi kebijakan publik ini dapat kita artikan suatu hukum. Akan tetapi tidak hanya sekedar hukum namun kita harus memahaminya secara utuh dan benar. Ketika suatu isu yang menyangkut kepentingan bersama dipandang perlu untuk diatur maka formulasi isu tersebut menjadi kebijakan publik harus dilakukan dan disusun dan disepakati oleh para pejabat yang berwenang dan ketika kebijakan publik tersebut ditetapkan menjadi suatu kebijakan publik; apakah menjadi undang-undang, apakah menjadi peraturan pemerintah atau peraturan presiden termasuk peraturan daerah, termasuk pula peraturan Bupati maka kebijakan publik tersebut berubah menjadi hukum yang harus ditaati.

Dunn (2003:44) mengatakan, kebijakan publik adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-

keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah.

Dari berbagai pendapat para pakar tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik dibuat untuk menghadapi masalah yang muncul yang dibuat sebagai sebuah aturan dari pemerintah dengan tujuan tertentu.

1.3.3 Implementasi Kebijakan Publik

Kajian implementasi merupakan suatu proses merubah gagasan atau program mengenai tindakan dan bagaimana kemungkinan cara menjalankan perubahan tersebut. Implementasi kebijakan juga merupakan suatu proses dalam kebijakan publik yang mengarah pada pelaksanaan dari kebijakan yang telah dibuat. Dalam praktiknya, implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks, bahkan tidak jarang bermuatan politis karena adanya intervensi dari berbagai kepentingan.

Eugene dalam Agustino (2006:153) mengungkapkan bahwa cukup untuk membuat sebuah program dan kebijaksanaan umum yang kelihatannya bagus di atas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendegarkannya. Dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk yang memuaskan semua orang.

Riant D Nugroho (2003 :158) menyatakan bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang dilakukan yaitu Langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program, atau Melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

dari beberapa definisi diatas Implementasi Kebijakan Publik adalah pelaksanaan kebijakan yang didalamnya

terdapat cara-cara atau aktivitas-aktivitas atau proses untuk mencapai tujuan kebijakan, juga ada sasaran dan hasil analisis setelah kebijakan itu dilaksanakan.

1.3.4 Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik

Dalam sejarah perkembangan studi implementasi kebijakan, dijelaskan tentang adanya dua pendekatan guna memahami implementasi kebijakan, yakni: Pendekatan *top down dan bottom up*. Dalam bahasa Lester dan Stewart (2008:108) istilah itu dinamakan dengan *the command and control approach* (pendekatan kontrol dan komando, yang mirip dengan *top down approach*) dan *the market approach* (pendekatan pasar, yang mirip dengan *bottom up approach*). Masing-masing pendekatan mengajukan model-model kerangka kerja dalam membentuk keterkaitan antara kebijakan dan hasilnya. Sedangkan pendekatan *top down*, misalnya dapat disebut sebagai pendekatan yang mendominasi awal perkembangan studi implementasi kebijakan, walaupun hari diantara pengikut pendekatan ini terdapat perbedaan-perbedaan, sehingga meneruskan pendekatan *bottom up*, namun pada dasarnya mereka bertitik-tolak pada asumsi-asumsi yang sama dalam mengembangkan kerangka analisis tentang studi implementasi. Dalam pendekatan *top down*, implementasi kebijakan yang dilakukan tersentralisir dan dimulai dari aktor tingkat pusat, dan keputusannya pun diambil dari tingkat pusat. Pendekatan *top down* bertitik-tolak dari perspektif bahwa keputusan-keputusan politik (kebijakan) yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh administrator-administratur atau birokrat-birokrat pada level bawahnya. Jadi ini pendekatan *top down* adalah sejauhmana tindakan para pelaksana (administrator dan birokrat) sesuai dengan prosedur serta tujuan yang telah digariskan oleh para pembuat kebijakan di tingkat pusat.

Model pendekatan *top-down* yang dirumuskan oleh Donald Van Metter dan Carl Van Horn (dalam Agustino, 2006 :144), disebut dengan *A Model of The Policy Implementation*. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau permormansi suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik Ada enam variabel, menurut Van Metter dan Van Horn yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik tersebut adalah ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, disposisi, komunikasi, lingkungan.

George Edward III (dalam Nugroho, 2009:512) menegaskan bahwa masalah utama administrasi publik adalah *lack of attention to implementation*. Dikatakannya, *without effective implementation the decision of policymakers will not be carried out successfully* (tanpa implementasi yang efektif, keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil). Menurutnya, Implementasi kebijakan yang efektif dapat dilihat dari ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan target, ketepatan lingkungan, ketepatan proses.

Dari pengertian diatas maka Implementasi *E-government* melalui Media Informasi Publik di Kabupaten Tegal ini merupakan pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam bidang pengembangan pembangunan didalamnya juga terdapat cara-cara utuk mencapai tujuan, dalam hal ini digunakan untuk mencapai tujuan pengembangan pembangunan.

1.3.5 Faktor Pendorong dan Penghambat Kebijakan Publik

Menurut model yang dikembangkan oleh Edward III, ada empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan (Agustino:2006:156), yaitu:

1. Faktor Sumber Daya

Indikator-indikator yang dipergunakan untuk melihat sejauhmana sumber daya dapat berjalan dengan rapi dan baik adalah: staff, informasi, implementor, wewenang, dan fasilitas-fasilitas fisik.

2. Faktor Komunikasi

Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi, yaitu: transmisi, kejelasan komunikasi, dan konsistensi.

3. Faktor Disposisi (sikap)

Hal-hal penting yang perlu diperhatikan pada variabel disposisi adalah pengangkatan birokrat dan insentif.

4. Faktor Struktur Birokrasi

Terdapat dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi ke arah yang lebih baik, yaitu dengan melakukan *Standard Operating Prosedures* (SOP) dan melaksanakan fragmentasi.

1.4 Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif bertipe deskriptif, yaitu data yang terkumpul berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

2.1 Implementasi e-Government Melalui Media Informasi Publik (MIP) untuk Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Tegal

Dalam implementasi kebijakan *e-government* melalui media informasi publik di Kabupaten Tegal, dilakukan pengamatan untuk mengetahui dan menganalisis proses implementasi kebijakan tersebut apakah sudah efektif dalam menyelesaikan masalah terkait keterbukaan informasi pemerintahan daerah terhadap publik di Kabupaten Tegal, serta faktor-faktor apa saja yang mendorong dan atau menghambat proses implementasi.

Inpres No.3 Tahun 2000 tentang *e-government* yang kemudian difokuskan menjadi Peraturan Pemerintah No.82 tahun 2012 yang membahas tentang penyebaran informasi elektronik dalam mewujudkan pemerintahan yang baik melalui asas keterbukaan informasi kepada publik melalui website daerah Kabupaten Tegal. Melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (DISHUBKOMINFO) diharapkan dapat memberi kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh informasi-informasi yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah dimana bertempat tinggal sehingga masyarakat dapat ikut memonitor jalannya pemerintahan. Dalam perjalanannya perlu dilihat dan diketahui proses implementasi kebijakan yang berlangsung di lapangan. Proses implementasi ini dilihat dari aspek (1) ketepatan kebijakan; (2) ketepatan pelaksanaan; (3) ketepatan target; (4) ketepatan lingkungan; dan (5) ketepatan proses, berikut penjelasannya:

a. Ketepatan Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai produktivitas, dapat diketahui bahwa Ketepatan kebijakan melihat bahwa kebijakan media informasi publik melalui website daerah yang dikeluarkan berisi hal-hal yang bertujuan memecahkan masalah

yang ada, dalam hal ini masalah keterbukaan dan transmisi informasi pemerintah daerah kepada publik khususnya di Kabupaten Tegal. Permasalahan-permasalahan yang akan diselesaikan dengan kebijakan Media Informasi Publik melalui website daerah tentunya memiliki karakter, apakah implementasi kebijakan Media Informasi Publik melalui website daerah yang bertujuan untuk memecahkan masalah sudah sesuai dengan karakter-karakter masalah yang sesungguhnya dihadapi oleh masyarakat Kabupaten Tegal.

Dalam penerapan kebijakan Media Informasi Publik melalui website daerah di Kabupaten Tegal, terdapat kejelasan isi kebijakan di lihat dari regulasi – regulasi yang di edarkan dari Pemerintah Pusat jelas dan mampu dimengerti dan di terapkan, selain itu adanya keselarasan antara koordinasi kelompok – kelompok luar yang berpartisipasi dalam implementasi tersebut, seperti dinas – dinas terkait selain DISHUBKOMINFO, yang terbentuk dalam tim untuk memberikan informasi-informasi dari SKPD-SKPD yang akan dimasukkan ke dalam website daerah Kabupaten Tegal.

Dari hasil penelitian diperoleh pengertian bahwa Media Informasi Publik (MIP) adalah sarana pemerintah untuk menyampaikan segala bentuk informasi dalam rangka terselenggaranya keterbukaan informasi terhadap publik melalui media elektronik berupa informasi digital melalui website daerah sehingga publik dapat mengetahui perkembangan yang ada pada Pemerintah daerah. Website daerah Pemerintah Kabupaten Tegal adalah www.tegalkab.go.id yang menjadi pengimplementasian Media Informasi Publik (MIP) sebagai salah satu bentuk penerapan *e-government* di Pemerintahan Kabupaten Tegal.

MIP melalui website daerah diharapkan menjadi jembatan penyaluran

informasi kepada publik sehingga tidak terputus dan dapat berkesinambungan.

Beberapa masalah yang muncul pada implementasi MIP di Kabupaten Tegal. Masalah yang utama adalah *server* DISHUBKOMINFO yang menjalankan website daerah sering mengalami *down/error*. *Down* pada *server* DISHUBKOMINFO diakibatkan oleh *bandwidth* kuota yang masih minim sehingga menyebabkan transfer data kepada user terhambat yang biasa disebut *overload* dan mengakibatkan halaman website tidak dapat terbuka atau membutuhkan waktu yang relatif lama.

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan dari jawaban informan bahwa pemecahan masalah-masalah yang muncul dalam implementasi MIP melalui website daerah dengan melakukan penambahan *server* yang akan meningkatkan kuota *bandwidth* sehingga dapat menampung pengakses *website* dan menghindari terjadinya *server down*. Namun, penambahan *server* baru berarti sama dengan menambah pembelanjaan anggaran daerah. Pengajuan rancangan anggaran untuk belanja *server* baru sudah dilakukan dan baru diperoleh tahun depan, yaitu 2017.

b. Ketepatan Pelaksanaan

Berdasarkan hasil penelitian, Ada tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerjasama antara pemerintah-masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan, pihak swasta dimana hal ini memegang peran dalam penyedia alat – alat serta perangkat pelaksana kebijakan. Dan yang ketiga adalah Masyarakat, yang memiliki peran cukup penting juga dalam proses implementasi kebijakan ini.

Dalam implementasi Kebijakan MIP melalui website daerah ini, baik pemerintah, swasta, dan masyarakat sama-sama memiliki peran yang sama pentingnya, Pemerintah

dalam hal ini berperan dalam hal regulasi dan memberikan pedoman dalam pelaksanaan realisasi kebijakan, sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Sedangkan pihak swasta berperan dalam penyediaan perangkat atau alat – alat perlengkapan untuk merealisasikan kebijakan tersebut dalam hal fisik berupa gambar, sosialisasi, promosi dan pengadaan fasilitas. Dan masyarakat, berperan dalam partisipasi aktif untuk mensukseskan kebijakan yang diselenggarakan dengan cara aktif mengakses website daerah sebagai wujud partisipasi.

Unsur Pelaksana merupakan bagian yang cukup penting dan krusial, karena berhasil atau tidaknya implementasi sangat bergantung pula pada peran tiap – tiap pelaksana. Menurut peneliti, yang terjadi di lapangan adalah peran Pemerintah masih berkesan mendominasi dalam implementasi Kebijakan ini, sedangkan peran dari pelaksana lainnya masih belum optimal dan dipandang belum sesuai dengan yang seharusnya. Hal ini terlihat dari perencanaan hinggapelaksanaan peran pemerintah yang benar – benar bertanggung jawab secara garis besar.

Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian yang menemukan bahwa peran Dishubkominfo masih sangat besar atau mendominasi dengan bertanggungjawab sebagai pengelola website daerah, penyortir informasi-informasi pad website dan pengumpul informasi dari SKPD seluruh Kabupaten Tegal. Sehingga dengan adanya koordinasi dan penggunaan wewenang yang tepat, diharapkan pembagian tugas dan komitmen pelaksana dalam melaksanakan tugas dapat dengan baik berjalan dan capaian target dalam implementasi tercapai.

Selain itu, hal yang mendasari bahwa pada Ketepatan unsur pelaksana sudah dirasa tepat dapat di lihat dari ketersediaan sumber daya. Dishubkominfo secara tupoksi

memang instansi yang secara teknis diberi tugas untuk mengelola teknologi dan informasi di Kabupaten Tegal. DISHUBKOMINFO memiliki sumberdaya yang memang menguasai bidang teknologi informasi. Bidang teknologi, informasi, pos dan telekomunikasi yang terbagi menjadi 3 seksi bagian yaitu seksi pengembangan sistem informasi, seksi pos dan telekomunikasi dan seksi aplikasi telematika sebagai bidang yang berwenang mengurus website daerah pada DISHUBKOMINFO Kabupaten Tegal. Selain itu DISHUBKOMINFO berkerjasama dengan 40 SKPD, 18 kecamatan dan 6 kelurahan sebagai penyedia informasi yang akan disaring dan kemudian diupload ke dalam website daerah oleh Dishubkominfo.

Komitmen pelaksana menjadi salah satu faktor yang strategis untuk mengoptimalkan implementasi MIP melalui website daerah Kabupaten Tegal. Dishubkominfo yang ditunjuk sebagai lembaga teknis yang mengelola MIP ini, sudah maksimalkan seluruh sumberdaya yang dimiliki adalah salah satu bentuk komitmen yang diberikan. Sedangkan, dari sisi SKPD-SKPD komitmen yang diberikan dalam pelaksanaan MIP ini dengan aktif memberikan informasi-informasi. Namun, berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh sudah ada beberapa SKPD yang berkomitmen dengan aktif memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan juga masih ada SKPD yang belum memberikan informasi untuk diupload kedalam website daerah Kabupaten Tegal sehingga dapat dikatakan komitmen SKPD-SKPD masih belum optimal.

Dari hasil penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa dukungan dari Dishubkominfo khususnya yang dilakukan adalah dengan memberikansosialisasi dan pelatihan yang dilakukan dengan cukup baik sejauh ini. Jadi staff diberikan sosialisasi dan pelatihan secara berkala agar nantinya

informasi yang diberikan kepada Dishubkominfo sudah siap saji, artinya hanya tinggal mengupload saja. Kedepan nantinya staff dari masing-masing SKPD yang akan mengupload sendiri. Hal ini akan meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyediaan informasi pada website daerah Kabupaten Tegal.

c. Ketepatan Target

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa dalam poin ketepatan target belum berhasil, karena memang ada beberapa aspek berdasarkan isu pokok implementasi yang memang menjadi alasan mengapa ketepatan target dirasa belum tepat dan masih perlu di tingkatkan lagi. Oleh karena itu, sangat diperlukan peningkatan di segi komunikasi. Dalam hal ini masih minimnya usaha yang dilakukan oleh Dishubkominfo untuk meningkatkan jumlah pengakses. Peneliti dapat menyimpulkan berdasarkan paparan bahwa Dishubkominfo melakukan sosialisasi hanya lewat website sedangkan website sendiri masih memiliki pengunjung yang minim sehingga usaha yang dilakukan terbilang kurang efektif untuk menyelesaikan masalah yang ada pada implementasi MIP melalui website daerah.

d. Ketepatan Lingkungan

Ketepatan lingkungan merujuk pada keterlibatan antara para implementor, baik dari Pemerintah pusat, Pemerintah daerah, hingga ke tingkat Kecamatan sekalian. Terdapat 40 SKPD, 18 kecamatan dan 6 kelurahan sebagai penyedia informasi yang akan disaring dan kemudian diupload ke dalam website daerah oleh Dishubkominfo. Yang menjadi masalah bagaimana interaksi yang dilakukan Dishubkominfo dengan 40 SKPD, 18 kecamatan dan 6 kelurahan tersebut untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan sebagai bahan pada website daerah. Pada umumnya masing-masing SKPD sudah memiliki website sendiri dan tidak ada kewajiban untuk setiap SKPD memberikan informasi kepada

DISHUBKOMINFO. Setiap SKPD memiliki hak, tetapi tidak memiliki kewajiban untuk mengupload informasi dari SKPDnya kepada website daerah yang dikelola DISHUBKOMINFO dikarenakan website tersebut mewakili seluruh komponen Kabupaten Tegal. Hal ini menyebabkan terbatasnya informasi yang tersedia apabila tidak ada kerjasama dan interaksi yang baik antara Dishubkominfo dan SKPD-SKPD lain. Koordinasi antar instansi menjadi proses awal dalam implementasi MIP melalui website daerah.

e. Ketepatan Proses

Berdasarkan hasil penelitian efektifitas implementasi MIP melalui website daerah yang terakhir dapat dilihat dari ketepatan proses yang pertama, mengenai *Policy Acceptance* berkaitan dengan pemahaman implementor terhadap kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan, dan penting untuk masa depan. Informan selaku implementor kebijakan menyatakan bahwa kebijakan MIP di Kabupaten Tegal ini penting. Kemudian karena kebijakan ini penting untuk masa depan, maka seluruh anggota dan elemen Dishubkominfo serta seluruh jajaran SKPD diharapkan memiliki komitmen terhadap isu perijinan mendirikan bangunan agar implementasi kebijakan dapat berjalan efektif.

Kedua, mengenai *Policy Adoption* berkaitan dengan penerimaan implementor terhadap kebijakan MIP di Kabupaten Tegal. Pada tahap ini implementor tidak lagi hanya memahami, akan tetapi menerima kebijakan dengan mulai mempersiapkan dirinya sebagai implementor. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa implementor menerima kebijakan karena sudah dikoridori oleh Surat keputusan Bupati Tegal No : 555/548/2013 tentang Penetapan Domain website kabupaten Tegal.

Ketiga, mengenai *policy readiness* berkaitan dengan persiapan yang dilakukan

oleh implementor untuk mengimplementasikan kebijakan. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa untuk mempersiapkan kebijakan ini, implementor dalam hal ini Dishubkominfo dan SKPD seluruh Kabupaten Tegal sebagai badan yang mengelola kebijakan MIP ini. Kemudian, perlu adanya dibuat promosi dan dilakukan sosialisasi oleh pihak Dishubkominfo agar masyarakat lebih aktif berpartisipasi mensukseskan kebijakan MIP tersebut. Informasi dikirimkan oleh tiap SKPD melalui Email. Informasi yang masuk kepada Dishubkominfo masih perlu melewati tahap verifikasi karena informasi tersebut perlu dipilah apakah mengandung unsur politik, memancing pro kontra atau menyinggung individu atau kelompok tertentu. Setelah itu informasi yang sudah diverifikasi diberikan kembali kepada admin website agar dapat diunggah sehingga informasi dapat diterima kemudian oleh pengakses.

Hasil yang akan dicapai dengan adanya penerapan kebijakan ini adalah tersampainya informasi kepada masyarakat umum baik masyarakat lokal Kabupaten Tegal maupun masyarakat umum lainnya bahkan dari luar negeri mengenai informasi dan kegiatan di Kabupaten Tegal. Sejauh ini sudah baik jika dilihat dari tujuan kebijakan dengan sudah berhasil menyampaikan informasi kepada masyarakat yang berarti sudah menjalankan salah satu asas pemerintahan yang baik yaitu asas keterbukaan informasi. Dalam mencapai tujuan tersebut yang dilakukan oleh Bagian teknologi, informasi, pos dan telekomunikasi dengan penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana MIP yang sejauh ini dapat dikatakan kurang. Namun, dinilai usaha yang dilakukan Dishubkominfo sudah baik dengan memasukan penyediaan sarana dan prasarana dalam RAPBD tahun anggaran ke depan.

PENUTUP

3.1 Simpulan

3.1.1 Implementasi *E-government* melalui Media Informasi Publik berbasis Website Daerah

Kemitraan Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa dari Implementasi *E-government* melalui Media Informasi Publik berbasis Website Daerah Dinas perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Tegal sudah berjalan dengan baik. Meskipun masih banyak kekurangan yang dirasakan seperti *website* yang masih sering *error* atau *trouble* karena *bandwidth* kuota yang masih kecil ketika *visitor* berjumlah banyak. *Visitor* terdata kurang lebih 8.000 *IP address*, yang digunakan pengunjung sebagai akun untuk mengakses website Kabupaten Tegal. Prosentase 11% dicapai berdasarkan perbandingan dengan jumlah penduduk usia produktif (15-60 th) Kabupaten Tegal pada Tahun 2013 yang berjumlah 889.565 jiwa.

Sumber Daya Manusia atau staff pelaksana dapat dinilai baik secara kualitas karena sudah adanya proses seleksi operator dari golongan sarjana yang mampu mengetahui dasar ilmu komputer dan teknologi informasi serta pelatihan yang berkelanjutan. Namun, terdapat kekurangan secara kuantitas SDM dikarenakan jumlah staff yang tidak sebanding dengan jumlah keseluruhan SKPD yang ada serta alat penunjang MIP yang masih minim.

Implementasi MIP melalui *website* daerah dapat dikatakan belum berhasil karena kurangnya capaian pemanfaat dari masyarakat dan minimnya usaha yang dilakukan oleh Dishubkominfo untuk mensosialisasikan *website* tersebut.

Belum adanya SOP menjadi hambatan yang membuat sulit untuk meningkatkan keberhasilan *website* daerah. Dengan belum adanya SOP maka sulit untuk

menentukan standar yang dibutuhkan untuk menilai capaian kinerja. SOPs juga dapat menjadi acuan yang dapat memotivasi organisasi untuk dapat mencapai tujuan yang sudah ditargetkan.

3.1.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi *E-government* melalui Media Informasi Publik berbasis Website Daerah

Berikut ini merupakan faktor yang mendorong dan menghambat kinerja Bidang Pengembangan Potensi dan Kemitraan. Faktor pendorong kinerja Bidang Pengembangan Potensi dan Kemitraan antara lain sebagai berikut :

- a. Staff sudah memiliki kompetensi khusus berdasarkan dari latar belakang pendidikan dan pelatihan yang didapatkan
- b. Setiap seksi Bagian teknologi, informasi, pos dan telekomunikasi Dishubkominfo Kabupaten Tegal dapat mentransmisikan informasi antar unit dengan baik dan tidak ada masalah.
- c. Adanya pelatihan – pelatihan terhadap seluruh petugas baik yang ada di lingkungan Dishubkominfo maupun dari SKPD yang lain atau dengan bekerja sama dengan pihak ketiga seperti yang sudah dilakukan yaitu bekerja sama dengan Telkom kabupaten Tegal.

Sedangkan faktor penghambat kinerja Bidang Pengembangan Potensi dan Kemitraan antara lain sebagai berikut :

- a. Jumlah staff yang mengurus *website* daerah masih terbatas yaitu 2 orang. Ini masih sangat kurang jika dibandingkan dengan beban kerja yang diterima dengan mengurus informasi dari 40 SKPD, 18 Kecamatan dan 6 Kelurahan.
- b. PNS yang ada masih minim yang menguasai bidang teknologi informasi. Dalam pelaksanaannya bersama dengan seluruh SKPD melakukan seleksi yang cukup ketat untuk menjaring personel –

personel yang dirasa mampu untuk mengurus MIP.

- c. Belum ada SOP yang secara tegas mengatur kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai atau pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya setiap hari sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

3.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, masih menunjukkan bahwa masih ditemukan beberapa hambatan pada pelaksanaan *e-government* melalui MIP di Bidang teknologi, informasi, pos dan telekomunikasi. Oleh karena itu, saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut :

Untuk meningkatkan keberhasilan capaian Bidang teknologi, informasi, pos dan telekomunikasi Dishubkominfo Kabupaten Tegal dengan memanfaatkan keunggulan yang sudah ada.

- a. Staff pelaksana *website* daerah perlu ditambah, karena sulit untuk menerima pegawai baru dapat dilakukan dengan melakukan sewa tenaga kontrak.
- b. Menambah sarana dan prasarana penunjang MIP seperti jumlah *server*, komputer dan *bandwidth* kuota untuk kelancaran sistem yang akan dimanfaatkan oleh masyarakat.
- c. Membuat SOP agar memiliki standar yang menjadi acuan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan keberhasilan dalam mengimplementasikan MIP *website* daerah Kabupaten Tegal.
- d. Mensosialisasikan *website* daerah dengan dibantu pihak ketiga seperti disosialisasikan ke sekolah-sekolah, kantor-kantor dan media massa.
- e. Melakukan pendidikan dan pelatihan kepada staff-staff lain agar tidak bergantung kepada satu atau dua staff tertentu yang membuat program lambat berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solidin. 1991. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar – Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : CV Alfabeta
- Ali Mufiz. 2004. *Pengantar Administrasi Negara*. Jakarta : Pusat Penerbitan Universitas Terbuka (8).
- Anderson James E. 1984. *Public Policy Making*. New York : Holt Rinehart.
- Bastian, Indra. 2003. *Sistem Akutansi Sektor Publik : Konsep untuk Pemerintah Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Bambang Wicaksono. 2006. *Pelayanan Publik Pemerataan dan Administrasi Baru*. Jakarta: LP3ES
- Bunafit Nugroho. 2004. *Aplikasi Pemrograman Web Dinamis dengan PHP dan MySQL*. Yogyakarta : Gava Media (3).
- D, Riant Nugroho. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Dwiyono, Indiahono. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta : Gava Media.
- Islamy Irfan M. 1997. *Prinsip – Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara* . Jakarta : Bina Aksara.
- Moeloeng, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia Buku III : Landasan dan Pedoman Pokok Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Administrasi Negara. 2004. Jakarta (534).
- Subarsono, A.G. 2006. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2005. *Metode Administrasi*. Bandung : Alfabeta

Impres No. 3 Th 2003 tentang Kebijakan
dan Strategi Pengembangan *e-*
Government

PP No. 82 Th 2012

Surat keputusan Bupati Tegal No :
555/548/2013 tentang Penetapan Domain
website kabupaten Tegal